

Dari Sekolah Kolonial (*Kweekschool*) ke Gerakan Nasional: Politik Etis dan Pengaruhnya terhadap Transformasi Sosial di Indonesia

Habib Akbar Nurhakim, Annas Ma'ruf Pramuharam, Muhammad Iqbal Birsyada*

Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Yogyakarta
Jl. IKIP PGRI I Sonosewu No.117, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta - Indonesia

*Alamat korespondensi: iqbal@upy.ac.id
DOI: <https://doi.org/10.14710/jscl.v9i2.46789>

Diterima/Received: 11 Juni 2022; Direvisi/Revised: 10 Januari 2025; Disetujui/Accepted: 16 Januari 2025

Abstract

This article aims to: (1) explain the ethical politics and the origins of the Kweekschool establishment policy; (2) analyze the educational system and programs offered at Kweekschool; (3) examine the influence of Kweekschool on the social transformation of the native (bumiputra) community. This study employs a historical research method. The findings indicate that: (1) The ethical politics, formalized by Queen Wilhelmina in 1901, led to the implementation of the Kweekschoolplan in 1927, which facilitated the establishment of Kweekschool as a response to the need for local teachers; (2) Kweekschool offered various educational programs aimed at training different categories of teachers, including those for rural schools and for Vervolgschools; (3) The ethical politics contributed to a social transformation within the bumiputra community, as Kweekschool graduates, who formed the educated elite, played a significant role in the emergence of nationalist movements that contributed to Indonesia's struggle for independence.

Keywords: *Kweekschool; National Movement; Teacher Education; Ethical Policy; Social Transformation.*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk: (1) menjelaskan politik etis dan asal-usul kebijakan pendirian *Kweekschool*; (2) menganalisis sistem pendidikan dan program-program yang ditawarkan di *Kweekschool*; (3) mengkaji pengaruh *Kweekschool* terhadap transformasi sosial masyarakat bumiputra. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Politik etis yang dipformalkan oleh Ratu Wilhelmina pada 1901 mendorong implementasi *Kweekschoolplan* pada 1927, yang memfasilitasi pendirian *Kweekschool* sebagai respons terhadap kebutuhan guru lokal; (2) *Kweekschool* menawarkan berbagai program pendidikan yang bertujuan untuk melatih berbagai kategori guru, termasuk untuk sekolah desa dan *Vervolgschool*; (3) Politik etis berkontribusi pada transformasi sosial dalam masyarakat bumiputra, karena lulusan *Kweekschool*, yang membentuk golongan terpelajar, memainkan peran penting dalam munculnya gerakan-gerakan nasionalis yang berkontribusi pada perjuangan Indonesia untuk kemerdekaan.

Kata kunci: *Kweekschool; Pergerakan Nasional; Pendidikan Guru; Politik Etis; Transformasi Sosial.*

Pendahuluan

Situasi masyarakat Indonesia pada abad ke-19 sangat memperhatikan. Pasalnya pasca pemberlakuan kebijakan tanam paksa oleh Pemerintahan Kolonial Belanda, rakyat mengalami penderitaan yang berkepanjangan. Selain Belanda mengeksploitasi kekayaan alam bangsa Indonesia juga melakukan eksploitasi pekerja secara masif (Ricklefs 2001). Kondisi penderitaan yang berkepanjangan seperti inilah nantinya yang akan mengawali kelompok terdidik,

terpelajar untuk memikirkan suatu tindakan kolektif keluar dari penjajahan (Birsyada et al. 2016). Pada awal abad ke-20 kondisi situasi politik di pemerintahan Belanda mengalami perubahan yang mendasar dan terstruktur. Berbagai kegiatan penaklukan dan eksploitasi yang sering dilakukan Belanda kini berubah dengan sebuah kebijakan politik untuk mencoba mensejahterakan rakyat pada wilayah-wilayah jajahan (Galih and Artono 2017). Kebijakan politik itu disebut *ethische politic* atau sering disebut dengan politik balas budi (Mulyono 1968).

Secara politis, pencetusan politik etis merupakan pertimbangan dari Belanda karena mulai menyadari bahwa sejak pertama kali eksploitasi Nusantara pada 1596 banyak melakukan kegiatan eksploitasi dan perbudakan di Indonesia. Selain melakukan eksploitasi dan penjajahan, Belanda juga melakukan politik pecah belah, politik adu domba dengan mengendalikan dan menguasai simpul-simpul kekuatan politik pada pemerintahan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Dengan cara demikian Belanda dapat melemahkan posisi dan kedaulatan para penguasa di berbagai daerah (Birsyada and Siswanta 2021). Terhadap situasi seperti ini Belanda mendapat berbagai kecaman-kecaman dari para penduduk pribumi khususnya kecaman rakyat Hindia Belanda lewat buku yang berjudul Max Havelaar (1860) (Galih and Artono 2017). Kondisi inilah nantinya yang akan memunculkan kesadaran nasional rakyat Indonesia untuk bersatu (Slamet Muljana 2008).

Seorang ahli hukum Belanda bernama Van Deventer (1857-1915) pernah tinggal di Indonesia pada 1899 dan kemudian menulis sebuah artikel dalam jurnal Belanda *de Gids* yang berjudul "*Een Eereschuld*" atau "*Suatu Hutang Kehormatan*". Dia mengatakan dalam artikel tersebut bahwa sesungguhnya pemerintah Belanda memiliki hutang banyak atas segala eksploitasi terhadap Indonesia, termasuk sumber daya alamnya yang melimpah dan penindasan rakyatnya. Hutang tersebut hendaknya dibayar oleh pemerintah Belanda dengan membuat suatu kebijakan yang dapat mensejahterakan rakyat Indonesia (Utomo 1995). Kemudian Wilhemina, Ratu Belanda pada 1901 melakukan suatu penyelidikan untuk mengetahui kesejahteraan rakyat Hindia Belanda khususnya wilayah Jawa. Akhirnya pada tahun tersebut, secara resmi Politik Etis disahkan (Galih and Artono 2017).

Salah satu program yang dicanangkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda dalam Kebijakan Politik Etis ini adalah pendidikan. Belanda saat itu mencoba untuk berusaha memperbaiki pendidikan dan pengajaran anak-anak bumiputra dengan menggunakan gaya pendidikan barat (Belanda). Jika mengkaitkan dengan kegiatan birokrasi pemerintahan, sebenarnya Belanda juga

sedang mengalami masalah kurangnya pekerja atau pegawai yang terdidik, sehingga hal tersebut yang menjadikan Belanda menggunakan pendidikan untuk mencetak tenaga kerja yang terdidik yang dibayar murah (Soniadewi and Charismana 2016). Terlebih ketika awal abad ke-20 yakni pada 1900-an awal, situasi stabilitas politik dunia sedang tidak aman karena adanya Perang Dunia I yang berpengaruh terhadap perekonomian di Hindia Belanda, sehingga pemerintah saat itu kekurangan anggaran untuk mendatangkan guru dari Belanda atau Eropa ke Hindia Belanda, apalagi situasi perang tersebut juga menyebabkan sulitnya akses keluar masuk antar negara (Alfarez 2022). Jika meninjau dari sumber lain, sebenarnya permasalahan mengenai kurangnya tenaga guru di Hindia Belanda sudah pernah terjadi pada 1848 (sebelum Politik Etis), yang kemudian menjadikan pemerintah kolonial pada 1852 mendirikan *Kweekschool* pertama kali di Surakarta. Walaupun saat itu murid-muridnya hanya terbatas pada anak-anak golongan bangsawan saja (Djumhur and Danasuparta 1974).

Namun, kondisi masalah kurangnya guru tersebut juga semakin terasa ketika Belanda pada masa Politik Etis ini mendirikan begitu banyak sekolah, yang kemudian disebut dengan golongan *sekolah ongko siji* (sekolah kelas I) dan *sekolah ongko loro* (sekolah kelas II). Sekolah kelas I diperuntukkan untuk golongan terkemuka, seperti golongan priyayi atau bangsawan (Lubis et al. 2013). Kemudian sekolah kelas II dibuka untuk mendidik rakyat-rakyat dari golongan bawah, berbeda seperti halnya sekolah kelas I. Sekolah kelas II ini bertujuan untuk mendidik rakyat pribumi agar mereka dapat bekerja menjadi pegawai dengan upah yang rendah (Ekajati and Kutoyo 1986). Kemudian lain dari itu juga ada sekolah-sekolah untuk pendidikan lanjutan yang sudah menggunakan bahasa pengantarnya dengan Bahasa Belanda (Kusmayadi 2017). Tidak seimbang jumlah guru yang dimiliki oleh pemerintah kolonial dengan jumlah sekolah yang begitu banyak, menyebabkan pemerintah kemudian memutuskan untuk membuka *Kweekschool-Kweekschool* di beberapa daerah untuk menyokong kekurangan guru yang masih

terjadi di Hindia Belanda. Akan tetapi, gaya pendidikan yang diterapkan harus mengacu pada gaya pendidikan-pendidikan Eropa (Suwignyo 2012).

Usaha-usaha untuk mendirikan berbagai *Kweekschool* (sekolah pendidikan guru) ini tentu juga disertai dengan program-program yang dicanangkan oleh pemerintah. *Kweekschool* sebagai sebuah wadah bagi para calon guru untuk mempelajari pengetahuan agar menjadi guru yang memiliki kompetensi berkualitas, yang kemudian oleh Bangsa Indonesia sendiri diharapkan dapat mencetak generasi bumiputra dengan pemikiran dan gagasan yang Nasionalis dan Revolusioner. Sehingga, dalam hal ini muncullah sebuah era pergerakan nasional di mana kaum terpelajar mulai berpikir bahwa perjuangan yang sebaiknya dilakukan dengan organisasi dan diplomasi. Berbeda dengan sebelumnya bahwasannya perjuangan selalu dilakukan dengan perang. Maka dari itu, lahirlah organisasi di berbagai daerah Indonesia yang berjuang demi tercapainya kemerdekaan Indonesia (Sudiyo 2002:17).

Berdasar penjelasan di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis Politik Etis dan permulaan adanya kebijakan pendirian *Kweekschool* (sekolah pendidikan guru), sistem pendidikan & program-program *Kweekschool*, hingga pengaruhnya terhadap transformasi sosial masyarakat Hindia Belanda kala itu yang mana perlu analisis lebih lanjut bagaimana para guru dapat menghasilkan generasi bumiputra yang berani melakukan gerakan nasional melalui organisasi-organisasi dengan tujuan memperjuangkan kemerdekaan Bangsa Indonesia.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang dilakukan melalui 5 tahapan, yakni: 1) pemilihan topik; 2) heuristik; 3) verifikasi; 4) interpretasi; dan 5) historiografi (Wasino 2007). *Pertama*, topik yang dipilih dan dibahas merupakan topik yang memiliki kaitan dengan sejarah serta memiliki kedekatan emosional dan intelektual (Kuntowijoyo 2013).

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil topik yang berhubungan dengan pergerakan nasional, yaitu "Sekolah Kolonial ke Gerakan Nasional: *Kweekschool* Pada Masa Kebijakan Politik Etis dan Pengaruhnya Terhadap Transformasi Sosial di Indonesia ." *Kedua*, heuristik atau pengumpulan sumber. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber sekunder berupa referensi buku, artikel jurnal, dan segala sumber yang akurat dan relevan serta tentunya berkaitan dengan topik penelitian ini. *Ketiga*, verifikasi atau kritik sumber, yang terdiri dari dua macam, yakni: kritik ekstern dan intern. Kritik ekstern dilakukan dengan mengecek keaslian sumber sejarah khususnya pada bagian fisik sumber, sementara kritik intern dilakukan dengan mengecek keaslian sumber sejarah terutama pada isi sumber sejarah tersebut. Dalam tahap ini, peneliti menganalisis sumber-sumber berupa artikel-artikel jurnal yang bereputasi dan juga buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian. *Keempat*, interpretasi atau disebut juga penafsiran. Penafsiran terdiri dari dua macam, yakni analisis dan sintesis. Analisis berarti menguraikan sumber-sumber sejarah, sementara sintesis yaitu menyatukannya agar terbentuk sebuah tulisan dengan makna yang utuh (Kuntowijoyo 2013)

Penafsiran di sini dilakukan dengan cara menguraikan sumber-sumber yang terdiri atas beberapa buku, kemudian juga dari berbagai jurnal-jurnal ilmiah, lalu menghubungkan satu dengan yang lainnya kemudian menyatukannya agar terbentuk sebuah tulisan dengan makna yang utuh. Peneliti menganalisis melalui referensi-referensi yang telah dikumpulkan terkait "Sekolah Kolonial ke Gerakan Nasional: *Kweekschool* Pada Masa Kebijakan Politik Etis dan Pengaruhnya Terhadap Transformasi Sosial di Indonesia", kemudian sintesis dilakukan oleh peneliti untuk menyatukan berbagai pemahaman dari sumber yang terkait dengan topik penelitian. *Kelima* historiografi yang biasa disebut penulisan sejarah. Didalam penulisan sejarah ada satu aspek yang sangat penting, yaitu aspek kronologi (Kuntowijoyo 2013). Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk memenuhi aspek tersebut

dengan cara melakukan penulisan berdasarkan urutan kronologi terjadinya peristiwa.

Politik Etis dan Awal Mula Kebijakan Pendirian *Kweekschool*

Pada 1840-an, gelombang revolusioner liberal menyebar di wilayah Eropa dan turut mempengaruhi kondisi/sistem politik Belanda. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan pimpinan Partai Liberal (Rudolf Thorbecke) dalam mendapatkan momentum untuk merubah sistem politik dinegara tersebut. Kemudian hal ini akhirnya juga mempengaruhi kebijakan di Hindia Belanda (Fachrurazi 2019). Pada 1899, Van Deventer seorang Belanda berhasil menerbitkan sebuah artikel di jurnal *De Gids* dengan judul "*Een Eereschuld*" atau "Suatu Hutang Kehormatan". Maksud daripada artikel itu adalah menjelaskan bahwasannya Belanda selama ini telah berhutang karena memperoleh keuntungan yang banyak dari hasil eksploitasi di Hindia belanda. Untuk itu, sesungguhnya Belanda berhak untuk membayar hutang tersebut (Utomo 1995). Hal ini juga serupa dengan penjelasan Galih (2017), bahwa semua eksploitasi yang telah dilakukan pemerintah kolonial di Hindia Belanda itu merupakan sebuah hutang, maka sudah sepantasnya bahwa pemerintah kolonial Belanda membayar hutang tersebut dengan membuat sebuah kebijakan kesejahteraan bagi masyarakat (Galih and Artono 2017).

Laporan Van Deventer tersebut dilatarbelakangi oleh laporan penelitian yang meneliti tentang kemerosotan penduduk Jawa. Kemudian laporan tersebut diajukan kepada kaum liberalis Belanda untuk dijadikan sebuah pertimbangan untuk menentukan sebuah kebijakan politik kesejahteraan di Jawa (Utari 2020). Sebab gagasan atau usulan dari Van Deventer lebih mudah diterima oleh para kaum politisi disana karena faktor dari sistem politik Belanda. Faktor lain adalah keberhasilan Partai Sosial Demokrat dan Partai Kristen yang telah berhasil memenangkan pemilihan di parlemen Belanda, sehingga koalisi tersebut membuat kesepakatan untuk membuat suatu kebijakan di Hindia Belanda (Niel 2009). Kemudian gagasan

untuk perbaikan kondisi kaum bumiputera menjadi landasan bagi koalisi tersebut. Usulan tersebut secara cepat sampai pada pemerintah Belanda dan dengan segera untuk merealisasikan kebijakan kesejahteraan di Hindia Belanda (Fachrurazi 2019).

Kemudian disisi lain ada juga berbagai kecaman-kecaman yang dilontarkan kepada pemerintah Belanda, salah satunya lewat novel Max Havelaar (1860). Kemudian dari novel tersebut muncul suara-suara Belanda yang mulai merasa bersimpati terhadap kemerosotan serta penderitaan rakyat Jawa yang tertindas. Mereka juga mulai berpikir untuk melakukan perubahan terhadap setiap kebijakan Belanda yang bersifat menindas rakyat (Galih and Artono 2017).

Wilhelmina yang pada waktu itu dinobatkan menjadi Ratu Belanda pada 6 September 1898 (Simbolon 2006). Kemudian Ratu Wilhemia berpidato yang isinya tentang dorongan untuk pemerintah kolonial Belanda untuk memperhatikan kesejahteraan Hindia Belanda (Galih and Artono 2017). Maka dari itu, pada 1901 pemerintah Belanda menetapkan sebuah kebijakan politik untuk kesejahteraan rakyat, kebijakan politik tersebut bernama "Politik Etis" atau "*ethische politic*" dan sering disebut pula dengan politik balas budi (Ricklefs and Nugraha 2008). Ratu Wilhelmina mewujudkan usulan Van Deventer dengan membentuk tiga program utama, yaitu: *Pertama* irigasi/pengairan, yakni program untuk pembangunan saluran pengairan yang terdiri dari waduk, bendungan untuk mengairi sawah dan perkebunan masyarakat. *Kedua* imigrasi, yakni program pemindahan penduduk Jawa ke wilayah lain yang masih sedikit penduduknya. *Ketiga* edukasi, yakni pembangunan pendidikan modern untuk rakyat bumiputera (Sumanto and F.X 1983).

Prinsip dasar dari implementasi politik etis dalam pendidikan adalah pendirian sekolah-sekolah. Politik etis dinilai menjadi kebijakan yang mengesankan masyarakat, sehingga penduduk pribumi pada waktu itu merasa bersimpati terhadap pemerintah kolonial Belanda. Padahal hal sebenarnya yang dilakukan oleh Belanda tetaplah sebuah eksploitasi, yang berarti politik etis tersebut adalah sebuah politik setengah hati

(Sumarno, Aji, and Hermawan 2019). Tujuan dari politik etis adalah untuk memperbaiki serta meningkatkan kesejahteraan kondisi kaum bumiputera. Dalam hal ini, program edukasi atau pendidikan menjadi suatu hal yang pokok (Yudi 2012). Kebijakan politik etis yang dianggap sangat penting pada masa itu adalah kebijakan di bidang pendidikannya. Karena memang kebutuhan akan pendidikan modern sangat diperlukan, mengingat selama ini masyarakat mengenyam pendidikan yang bersifat tradisional. Namun, tetap saja disisi lain dalam membuat kebijakan pendidikan di tanah jajahan ini hanya menjadi sebuah tiang penyangga kekuasaan kaum penjajah untuk mengendalikan masyarakat (Zed 2012).

Dalam bidang pendidikan, para pejabat Belanda bangga atas hasil dari usaha yang telah berjalan. Peningkatan dunia pendidikan dan pemerataan kesejahteraan bagi rakyat telah mendapatkan persetujuan dari para pendukung politik etis. Upaya-upaya dari para tokoh Belanda yang mendukung politik etis terus memberikan dukungan agar politik etis dapat terlaksana dengan baik. Harapan dari para pendukung adalah politik etis diharapkan dapat memberikan kemudahan dan keuntungan guna peningkatan kualitas sumber daya manusia rakyat Hindia Belanda (Ricklefs and Nugraha 2008).

Penyusunan atau perencanaan kebijakan pendidikan kala itu disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah kolonial Belanda dan tentunya tidak disusun dalam waktu yang singkat, namun disusun dalam waktu yang lama supaya mendapat hasil yang memuaskan bagi pemerintah (Riskha and Hudaidah 2021). Dengan demikian, sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah kolonial bersifat eksklusif atau istimewa, maka atas perintah Gubernur Jenderal Van Heutsz pada abad ke-20, pendidikan mulai diselenggarakan bagi masyarakat secara luas (Azra 2000). Sejak masa inilah, rakyat Hindia Belanda mulai memiliki kesempatan untuk menempuh pendidikan (Syarif 2019:117).

Namun, banyaknya sekolah rendah yang didirikan oleh pemerintah ternyata berakibat pada kurangnya tenaga pendidik/guru. Hal tersebut terjadi di setiap Kabupaten dan Karesidenan di Hindia Belanda. Langkah yang dilakukan oleh

pemerintah saat itu untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan mendirikan *Kweekschool* (sekolah pendidikan guru). Salah satu jenis sekolah guru yang didirikan oleh pemerintah bernama *Hoogere Kweekschool* yang bertujuan untuk memenuhi kekurangan tenaga pendidik yang bisa berbahasa Belanda. Salah satu *Hoogere Kweekschool* yang didirikan di wilayah yang strategis dan bertujuan untuk memenuhi kekurangan guru adalah *Hoogere Kweekschool* yang ada di Magelang (Seviana 2019).

Selain itu, pada masa Kebijakan Politik Etis ini, di Yogyakarta juga ada pula pendirian *Kweekschool* oleh organisasi bumiputra sendiri, yakni oleh Muhammadiyah bernama *Kweekschool Islam* atau *Kweekschool Moehammadijah* pada 1922 yang bertujuan untuk modernisasi pendidikan yang saat itu keadaan sosial masyarakat umat Islam sedang tertinggal (Palahuddin 2018). Pendirian *Kweekschool-Kweekschool* lainnya juga terus dilakukan sejalan dengan pendirian sekolah-sekolah rendah lainnya. Seperti halnya pendirian HIS (*Hollandsch Inlandsche School*) bagi masyarakat bumiputra yang kemudian pada 1914 menjadikan pemerintah mendirikan HKS (*Hoogere Kweekschool*) sebagai sekolah lanjutan *Kweekschool*. Perlu diketahui pula, bahwa pendirian *Kweekschool* pada masa Politik Etis ini sebenarnya merupakan realisasi dari program pemerintah, yakni *Kweekschoolplan* pada 1927. *Kweekschoolplan* ini juga sebenarnya menjadi solusi pemerintah untuk mengatasi HKS (*Hoogere Kweekschool*) yang ketika itu dinilai masih belum cukup dalam penguasaan Bahasa Belanda (Purwati 2015). Jenis-jenis sekolah lain yang turut berdiri yakni HCK (*Hollands Chinese Kweekschool*), HIK (*Hollands Inlandsche Kweekschool*), dan Kursus *Hoofdakte* (Kurniawati and Santosa 2023).

Kebijakan *Kweekschoolplan* ini oleh pemerintah digunakan untuk menentukan arah program pendidikan guru di seluruh wilayah Hindia Belanda (Alfarez 2022). Lebih lanjut juga bisa diketahui bahwa kebijakan *Kweekschoolplan* ini lebih mendorong segala program pendidikan guru dengan gaya pendidikan Belanda (Purwati 2015).

Program-Program *Kweekschool*

Awalnya kebijakan politik etis dilaksanakan secara tanggung jawab dan penuh perhatian. Belanda melakukannya dengan tekad yang baik serta tulus. Hal itu dikarenakan Belanda takut terhadap kritikan para kaum pribumi sebelumnya. Sebab lain juga mereka sadar bahwasannya Hindia Belanda sudah dirampas habis-habisan mulai dari sumber daya alam hingga penduduknya. Perlawanan dari rakyat juga tidak luput dari sebab Belanda tetap bertanggung jawab dengan kebijakan politik etis tersebut (Daliman 2012:72).

Dalam penyelenggaraannya, ternyata hanya kaum bangsawan atau para kaum priyayi saja yang dapat menempuh pendidikan. Sementara rakyat jelata atau rakyat dari golongan bawah tidak dapat merasakan pendidikan (Karsiwan and Sari 2021). Akan tetapi, ada sumber lain mengatakan berbeda, khususnya buku yang ditulis oleh Steenbrink dan Karel yang mengatakan bahwa sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah Kolonial Hindia Belanda tersebar secara luas dan merata, serta semua penduduk pribumi dapat mengenyam pendidikan (Steenbrink and A 1984:23–24).

Kemudian sekitar pada 1900 dimulailah pendirian sekolah-sekolah, baik untuk kaum golongan atas maupun golongan bawah atau menengah yang hampir tersebar luas di pulau Jawa. Mendengar hal ini, rakyat bumiputera merasa mendapat keuntungan karena mendapat kesempatan yang luas untuk mengenyam pendidikan modern. Ketika memasuki 1940, mulai banyak anak pribumi yang bersekolah. Tercatat mereka yang sekolah di sekolah kelas II mencapai dua juta lebih dan juga pada sekolah-sekolah Belanda telah mencapai delapan juta lebih (Sumanto and F.X 1983). Sistem pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial terdiri beberapa jenjang yang didasarkan kepada tingkatan kelas masyarakat. Pada 1900-1942 tingkatan pendidikan tersebut terdiri dari tiga jenjang, yaitu *Lager Onderwijs*/Pendidikan Rendah, *Middlebaar Onderwijs*/Pendidikan Menengah, dan *Vokonderwijs*/Pendidikan Tinggi atau Perguruan Tinggi (Riska and Hudaidah 2021). *Pertama* Pendidikan Rendah atau Dasar, terdiri dari jenis sekolah yang bahasa

pengantarnya menggunakan bahasa Belanda, yaitu HCS (*Hollandsch Chineesche School*), ELS (*Europese Lagere School*), HIS (*Hollands Inlandsche School*). *Kedua* Pendidikan Menengah atau Lanjutan, terdiri dari AMS (*Algemene Middelbare School*), HBS (*Hogere Burger School*), MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*) (Fahrozy et al. 2022:3095–96). *Ketiga* Pendidikan Tinggi/Perguruan Tinggi, terdiri dari NIAS (*Nederlansch Indische Artsen School*) (Galih and Artono 2017), OSVIA (*Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren*), STOVIA (*School tot Opleiding van Indische Artsen*), dll (Fakhriansyah and Patoni 2019:132–33).

Penjelasan sekolah untuk pribumi terdiri atas dua bagian, yaitu *pertama* Sekolah Dasar Kelas I. Sekolah ini didirikan untuk anak-anak golongan bangsawan atau priyayi (Lubis et al. 2013). Sekolah ini terdiri dari ELS, HCS, HBS (Nasution 1983:50–52). Kemudian *kedua*, Sekolah Dasar Kelas II didirikan untuk anak-anak golongan bawah/menengah. Tujuan dari sekolah ini hanya untuk mendidik masyarakat yang nantinya akan menjadi pegawai dengan upah yang rendah. Sekolah kelas II terdiri atas empat sekolah. *Pertama*, *Inlandscheschool*/sekolah bumiputera yang diperuntukkan bagi anak-anak golongan menengah pribumi. Lama jenjang belajarnya sampai lima tahun. *Kedua*, *Volkschool*/sekolah desa. Diperuntukkan/diutamakan dari anak-anak yang ada di desa/golongan rakyat biasa. Lama jenjang belajarnya sampai tiga tahun. Pemerintah sebagai penanggung jawab untuk membiayai sekolah-sekolah tersebut. Materi-materi yang diajarkan masih sekedar kepandaian membaca, menulis, dan berhitung. *Ketiga*, *Vervolgschool* (sekolah lanjutan). Sekolah ini merupakan sekolah lanjutan dari *Volkschool* (sekolah desa). Lama jenjang belajarnya sampai tiga tahun dan diutamakan untuk lulusan-lulusan sekolah desa yang berprestasi. *Keempat*, *Schakelschool* (sekolah peralihan). Pada 1921 sekolah ini didirikan di Bandung. Lama jenjang belajarnya adalah lima tahun (Ekajati and Kutoyo 1986). *Kweekschool* pada masa itu memiliki program seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Program Pendidikan Guru Sekolah Desa

Program	
Sistem Magang	<i>Cursus Volks-Onderwijzer (CVO)</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksanaannya dilaksanakan di <i>Vervolgschool</i> (Sekolah Kelas II). ▪ Sistem ini dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah atau sering disebut sebagai Mantri Guru. ▪ Peserta magang adalah mereka yang menamatkan Sekolah Kelas II atau <i>Vervolgschool</i>. ▪ Sistem ini diakhiri dengan ujian, yaitu Ujian PO (<i>Premie Opleiding</i>). Materi utama yang diuji adalah praktek mengajar dan yang menguji adalah Penilik/Pengawas Sekolah (<i>Schoolopziener</i>). Yang lulus akan diangkat menjadi Guru Bantu Sekolah Desa dengan surat keputusan Bupati. ▪ Pada 1921 sistem magang ini berakhir. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kursus ini menerima murid-murid dari Sekolah Kelas II atau Sekolah <i>Vervolg</i>. ▪ Lama belajar dua tahun. ▪ Bahasa pengantar adalah bahasa daerah. ▪ Lulusan CVO dapat bekerja sebagai Guru Bantu di Sekolah Desa. Guru Sekolah Desa itu bukanlah pegawai negeri.

Sumber: Djumhur and Danasuparta 1974.

Berdasar Tabel 1 di atas, terdapat beberapa sekolah dan kursus yang ditempuh oleh para calon guru sebelum menjadi guru mengajar di Sekolah Desa, yaitu sistem magang dan CVO. *Pertama*, Sistem Magang. Sistem ini dilaksanakan di *Vervolgschool* (Sekolah Kelas II) dengan Kepala Sekolah, atau sering disebut sebagai Mantri Guru sebagai pemimpinnya. Peserta yang mengikuti sistem magang ini merupakan mereka lulusan-lulusan dari Sekolah Kelas II (*Vervolgschool*). Sekolah ini diakhiri dengan ujian yang juga disebut dengan Ujian *Premie Opleiding* (PO). Penguji dari ujian ini adalah Penilik Sekolah (*Schoolopziener*) dengan bahan ujian yang diutamakan adalah tentang praktik mengajar. Setelah lulus dari sistem ini, maka mereka akan menjadi Guru Bantu Sekolah. *Kedua*, *Cursus Volks-Onderwijzer* (CVO). Peserta dari sekolah ini sama seperti sekolah sistem magang, yaitu mereka lulusan-lulusan dari Sekolah Kelas II atau *Vervolgschool*. Bahasa pengantar yang digunakan disekolah ini adalah bahasa daerah. Lama belajar yang harus ditempuh oleh para calon guru adalah dua tahun. Lulusan dari CVO ini akan bekerja sebagai Guru Bantu di Sekolah Desa. Guru Sekolah Desa bukanlah seorang pegawai negeri (Djumhur and Danasuparta 1974).

Berdasar Tabel 2, ada beberapa macam sekolah dan kursus yang harus ditempuh oleh para calon guru sebelum menjadi guru mengajar di *Vervolgschool*, yaitu *sistem magang*,

Normalcursus, *Normalschool (NS)*, dan *Kweekschool (KS)*. *Pertama*, sistem magang. Sistem magang dilaksanakan di Sekolah Kelas II (*Vervolgschool*) dan dipimpin oleh Mantri Guru. Untuk mendapat ijazah berupa ijazah GB (Guru Bantu Biasa), peserta harus menempuh ujian dan diuji oleh seorang Inspektur. Sama seperti sekolah sistem magang sebelumnya pada Sekolah Desa, yang lebih menekankan praktek mengajar dalam ujiannya. Dengan memiliki ijazah GB tersebut, maka para peserta berubah kedudukannya menjadi pegawai negeri dan dapat mengajar sampai kelas IV. *Kedua*, *Normalcursus*. Peserta dari kursus ini adalah para magang. Kursus ini diadakan di beberapa kota besar dan pada waktu petang hari. Kursus ini juga dianjurkan untuk para pemilik ijazah CVO yang sedang bekerja. Bahasa pengantar di kursus ini adalah bahasa daerah. Setelah mengikuti ujian dan kemudian memiliki ijazah, maka para peserta bisa menjadi pegawai negeri dan dapat mengajar sampai kelas IV serta menjadi Guru Bantu Biasa. *Ketiga*, *Normalschool (NS)*. Sekolah tersebut mulai didirikan pada 1914. Murid-murid yang bersekolah disini adalah mereka lulusan-lulusan dari Sekolah Kelas II (*Vervolgschool*). Bahasa pengantar di sekolah ini adalah bahasa daerah, akan tetapi juga diberikan bahasa Belanda. Lama belajar yang harus ditempuh para murid adalah empat tahun. Lulusan dari NS dapat mengajar sampai kelas tertinggi. *Keempat*, *Kweekschool (KS)*. Peserta

dari sekolah ini adalah mereka lulusan-lulusan dari HIS. Lama belajar yang harus ditempuh adalah enam tahun. Bahasa pengantar yang digunakan adalah Bahasa Belanda. Lulusan dari sekolah ini dapat mengajar sampai kelas tertinggi (Djumhur and Danasuparta 1974). Kemudian terdapat

perbedaan Sekolah Kelas I dan Sekolah Kelas II, yaitu pada biaya sekolah, tenaga pengajar, lama belajar, kurikulum, dan pesertanya (Lubis et al. 2013). Perbedaan kedua sekolah tersebut ditampilkan pada Tabel 3.

Tabel 2. Program Pendidikan Untuk Guru *Vervolgschool*

Sistem Magang	Program		
	<i>Normaalcursus</i> 2 Tahun	<i>Normaalschool</i> (NS)	<i>Kweekschool</i> (KS)
Diadakan di Sekolah <i>Vervolg</i> (Kelas II).	Peserta kursus ini adalah para magang dan juga para pemilik ijazah CVO yang sedang bekerja.	Mulai didirikan pada 1914.	Murid adalah lulusan HIS dan yang sederajat.
Magang ini diambil dari lulusan sekolah <i>Vervolg</i> (Sekolah Kelas II).	Kursus diberikan pada petang hari di beberapa kota besar.	Murid yang diterima adalah lulusan Sekolah <i>Vervolg</i> (Sekolah Kelas II).	Pada awalnya lama belajar enam tahun, kemudian berubah menjadi lima tahun, dan akhirnya berubah lagi menjadi empat tahun.
Pimpinannya dipegang oleh Mantri Guru.	Dengan memiliki ijazah <i>Normalcursus</i> , mereka dapat menjadi pegawai negeri.	Lama belajar adalah empat tahun.	Bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar.
Ada ujian untuk memperoleh ijazah Guru Bantu Biasa (GB). Ujian diutamakan berupa praktek mengajar.	Bahasa pengantarnya adalah bahasa daerah.	Bahasa pengantarnya adalah bahasa daerah, diberikan pula Bahasa Belanda.	Lulusan KS berwenang untuk mengajar sampai kelas tertinggi.
Peserta yang lulus dapat menjadi pegawai negeri dan berhak mengajar hingga kelas IV.	Setelah lulus ujian, mereka mempunyai wewenang untuk mengajar sampai kelas IV dan juga bisa disebut GB.	Lulusan <i>Normalschool</i> mempunyai wewenang untuk mengajar sampai kelas tertinggi.	

Sumber: Djumhur and Danasuparta 1974.

Tabel 3. Perbedaan Sekolah Kelas I dan Sekolah Kelas II

No	Aspek	Sekolah Kelas I	Sekolah Kelas II
1.	Tujuan Sekolah	Keperluan untuk memenuhi jabatan/pegawai pemerintahan.	Memenuhi kebutuhan akan pendidikan rakyat umum.
2.	Lama Pendidikan	Lima tahun.	Tiga tahun.
3.	Mata	Membaca, menulis, berhitung, ilmu bumi, sejarah, pengetahuan alam, menggambar, dan ilmu mengukur tanah.	Membaca, menulis, dan berhitung.
4.	Biaya Sekolah	Minimum f1/ bulan.	Tidak ditentukan.
5.	Guru-Guru	Lulusan <i>Kweekschool</i> (sekolah guru).	Tidak ada syarat.
6.	Bahasa Pengantar	Bahasa daerah. Bila hal ini tak mungkin, maka pelajaran dapat diberikan dalam bahasa Melayu.	Sama dengan sekolah kelas I.

Sumber: Djumhur and Danasuparta 1974.

Berdasar Tabel 3, Sekolah Kelas I dan Sekolah Kelas II memiliki perbedaan yang sangat jauh. Mulai dari tujuan, Sekolah Kelas I lebih memfokuskan untuk memenuhi kebutuhan dari pemerintah kolonial, seperti kebutuhan terhadap pegawai-pegawai pemerintah, perdagangan, dan perusahaan, sedangkan Sekolah Kelas II hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat umum. Lama belajar dari kedua sekolah tersebut juga berbeda, Sekolah Kelas I ditempuh dalam waktu 5 tahun, sedangkan Sekolah Kelas II ditempuh dalam waktu 3 tahun. Kemudian dari segi mata pelajaran yang diberikan sangat berbeda, Sekolah Kelas I diberikan pengajaran mengenai ilmu bumi, sejarah, pengetahuan alam, menggambar, dan mengukur tanah, tidak seperti Sekolah Kelas II yang hanya diberikan mata pelajaran menulis, membaca, dan berhitung. Biaya sekolah Sekolah Kelas I tiap bulannya minimum f 1, sedangkan Sekolah Kelas II sama sekali tidak ditentukan. Kemudian untuk pengajar atau guru, guru yang mengajar di Sekolah Kelas I adalah lulusan dari *Kweekschool*, berbeda dengan Sekolah Kelas II yang tidak ada syarat-syarat untuk menjadi guru disana. Untuk bahasa pengantar, Sekolah Kelas I dan Sekolah Kelas II sama-sama menggunakan bahasa daerah atau jika tidak memungkinkan, bisa menggunakan Bahasa Melayu (Djumhur and Danasuparta 1974). Menurut sumber lain yaitu Nasution (1983) dalam bukunya yang berjudul "Sejarah Pendidikan Indonesia", dijelaskan bahwasannya sekolah tersebut menggunakan kurikulum yang sama seperti sekolah sebelum tahun 1892 yang hanya memberikan pengajaran kepada siswa untuk membaca, berhitung, dan menulis. Kemudian mulai dimasukkan pelajaran Bahasa Belanda pada 1907 (Nasution 1983).

Namun, walaupun ada sebuah perbedaan, kedua jenis sekolah tersebut mampu menjadi wadah bagi masyarakat Hindia Belanda khususnya masyarakat umum atau rakyat biasa untuk bisa bersekolah. Politik etis memang bisa dikatakan menuntun rakyat Hindia Belanda, akan tetapi tetap saja bernaung dibawah kekuasaan pemerintah kolonial Belanda (Susilo and Isbandiyah 2018). Akan tetapi, walaupun pada saat itu masih dibawah pemerintah kolonial Belanda, pendidikan-pendidikan yang telah dijelaskan diatas ternyata

mempunyai dampak yang sangat besar bagi rakyat Hindia Belanda, terutama dapat menggeser Belanda dari Hindia Belanda.

Menuju Transformasi Sosial

Kweekschool tumbuh dan berkembang dengan pesat dan mampu mengatasi permasalahan mengenai kekurangan guru di sekolah-sekolah Hindia Belanda. *Kweekschool* yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda ini kemudian menjadi senjata makan tuan yang kemudian justru menjadikan guru-guru bumiputra memiliki kesadaran untuk mendidik murid-murid sekolah saat itu untuk kepentingan bangsa bumiputra sendiri, yakni mewujudkan kemerdekaan Indonesia dengan jiwa Nasionalis dan revolusioner. Oleh karena itu, selain guru-guru bumiputra mendapatkan upah untuk pemenuhan biaya hidup, mereka juga dapat menghasilkan lulusan-lulusan sekolah dengan murid-murid yang terdidik, yang nantinya akan ambil bagian dalam pergerakan nasional Indonesia (Alfarez 2022)

Maka dari itu pula masyarakat Hindia Belanda pada awal abad ke-20 mengalami masa transisi di mana masyarakat memiliki pengetahuan barat. Hal ini merupakan dampak dari pelaksanaan kebijakan dalam bidang pendidikan yang memberikan kesempatan bagi pribumi untuk menempuh pendidikan sekolah dengan sistem barat (Utari 2020). Kebijakan ini berpengaruh terhadap masyarakat, sehingga banyak perubahan yang terjadi kala itu. Sebelum adanya politik etis, rakyat hanya menerima semacam pengajaran yang bersifat tradisional dan itupun adalah inisiatif dari rakyat, dan sekarang semenjak adanya politik etis, rakyat dapat mengenyam pendidikan dengan sistem pengajaran barat yang lebih bersifat modern. Memang dalam kebijakan politik etis ini, edukasi atau pendidikan menjadi program yang paling sentral dan paling diperhatikan oleh pemerintah kolonial (Fachrurozi 2019).

Disisi lain, politik etis ternyata berdampak pada munculnya suatu kelas sosial baru dalam lingkungan rakyat bumiputera (Abdullah 2017). Kelas sosial baru ini disebut dengan bumiputera terpelajar dan merupakan rakyat bumiputera yang diberikan kesempatan untuk dapat mengenyam pendidikan Belanda. Sebagian besar bumiputera

terpelajar ini terdiri atas mahasiswa kedokteran (STOVIA). Tidak hanya mendapat kesempatan mengenyam pendidikan barat, tetapi mereka juga terpengaruh gaya hidup orang Belanda, seperti bahasa yang digunakan, yaitu Bahasa Belanda dan kemudian cara berpakaian orang Belanda (Pols 2019). Hal tersebut sudah dapat kita ketahui bahwa kaum bumiputera terpelajar sedikit-demi sedikit terpengaruh oleh budaya barat. Namun dampak-dampak tersebut tidak menjadi masalah yang begitu rumit, karena sistem pendidikan apapun yang diterapkan Belanda pada politik etis ini nantinya akan justru menjadi boomerang bagi pemerintah kolonial Belanda. Hal ini dikarenakan dengan membuka pendidikan bagi kaum bumiputera berarti sama saja memberikan sebuah senjata yang lebih mematikan daripada sebuah pistol ataupun meriam (Galih and Artono 2017).

Melalui politik etis, mulai muncul juga kesadaran baru. Bentuk dari kesadaran baru ini adalah semangat rakyat untuk menggapai kemajuan. Semangat ini terwujud dalam bentuk usaha untuk mencapai suatu kedudukan sosial yang ideal, baik secara individu maupun kelompok gabungan yang meliputi kemajuan modernisasi, keberhasilan hidup, dan bidang pendidikan (Yudi 2012). Disisi lain muncul juga para cendekia muda yang memiliki pemikiran kreatif serta inovatif untuk melakukan perubahan. Munculnya para kaum cendekia atau kaum terpelajar menjadi faktor yang sangat mempengaruhi terhadap kemerdekaan Indonesia dari para penjajah. Golongan terpelajar berusaha membebaskan Indonesia dari belenggu para penjajah dan membangkitkan kesadaran nasionalisme. (Imsawati 2017). Nasib bangsanya yang tertindas membuat para golongan terpelajar untuk bergerak menegakkan keadilan. Dikalangan terpelajar, para lulusan-lulusan dari sekolah tinggi seperti OSVIA dan STOVIA juga berperan dalam perjuangan bangsa Indonesia dalam pergerakan emansipasi kemerdekaan Indonesia (Leirissa and Zakarias 1985). Pergerakan emansipasi kemerdekaan ini dimulai dengan pendirian organisasi-organisasi pergerakan nasional (Susilo and Isbandiyah 2018).

Organisasi-organisasi tersebut yaitu, *Pertama*, Budi Oetomo. Seorang dokter Jawa bernama Mas Ngabehi Wahidin Sudirohusodo yang bercita-cita untuk meningkatkan

kesejahteraan martabat rakyat Hindia Belanda mulai mengadakan kampanye dikalangan priyayi di Jawa pada 1906 dan 1907. Bentuk usaha peningkatan kesejahteraan rakyat tersebut berupa program "Dana Belajar". Pada saat melakukan kampanye Mas Ngabehi Wahidin Sudirohusodo bertemu dengan pelajar kedokteran STOVIA, yaitu Sutomo. Pelajar STOVIA kala itu sebenarnya sudah memiliki cita-cita untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Maka dari itu, Sutomo bersama teman-temannya mulai membicarakan mengenai kampanye Mas Ngabehi Wahidin Sudirohudoso. Hasil dari pembicaraan tersebut menghasilkan sebuah tujuan baru yang awalnya hanya berupa program "Dana Belajar" dan kemudian diperluas lagi jangkauannya. Kemudian pada Hari Rabu 20 Mei 1908, para pelajar-pelajar STOVIA mendirikan sebuah organisasi bernama Budi Oetomo dan menunjuk Sutomo sebagai ketuanya (Kartodirdjo, Poesponegoro, and Notosusanto 1975).

Kedua, Sarekat Dagang Islam atau Sarekat Islam. Terjadinya persaingan dagang antara penduduk Indonesia dengan orang-orang China dan banyaknya perusahaan batik Indonesia yang jatuh di tangan pedagang China menjadikan seorang pengusaha batik Surakarta H. Samanhudi merasa tidak adil terhadap keputusan Belanda yang selalu memberikan keringanan kepada para pedagang China di bandingkan dengan pedagang Indonesia, sehingga merugikan para pedagang-pedagang Indonesia khususnya pedagang batik. Untuk memberikan perlindungan serta memperbaiki keadaan tersebut, H. Samanhudi mendirikan sebuah organisasi bernama SDI (Sarekat Dagang Islam) yang bertujuan untuk mewadahi para pedagang-pedagang Islam dan para pedagang batik untuk bisa bersaing dengan para pedagang China. Kemudian seiring berjalannya waktu, H. Samanhudi menyerahkan SDI kepada H.O.S Tjokroaminoto untuk menjadi pemimpinnya. Kemudian H.O.S. Tjokroaminoto membuat akta serta hukum baru organisasi tersebut dan yang awalnya bernama Sarekat Dagang Islam (SDI) menjadi Sarekat Islam (SI) dan secara resmi berdiri pada 10 September 1912. Sarekat Islam berkembang dan menjadi organisasi yang memiliki pengaruh besar pada era pergerakan nasional. Sarekat Islam yang awalnya bertujuan

untuk dapat menyaingi para pedagang China, kini pada era pergerakan nasional memperluas dirinya dengan melawan ketidakadilan para pejabat Belanda terhadap rakyat Indonesia. Sarekat Islam juga mengarah kepada bidang politik dengan memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia yang tertindas oleh kebijakan pemerintah Belanda kala itu (Yasmis 2009).

Ketiga, Indische Partij. Pada 6 September 1912, sebuah organisasi pendukung gagasan revolusioner nasional bernama Indische Partij telah didirikan. Seorang Indo bernama Danudirdja Setyabuddhi atau dikenal sebagai E.F.E. Douwes Dekker melihat adanya keganjilan-keganjilan dalam masyarakat kolonial, khususnya diskriminasi antara keturunan Belanda dan kaum Indo. Indische Partij dibentuk guna sebagai perlawanan kepada pemerintah kolonial Belanda. Pada saat itu, Indische Partij sedang menggenjil-gengjilkan propagandanya. Propaganda tersebut disalurkan lewat karangan-karangan yang diterbitkan di *De Express* yang diantaranya berisikan menyadarkan rakyat Indonesia bahwasannya mereka telah terancam oleh eksploitasi kolonial dan upaya-upaya penghapusan sistem pemerintahan kolonial. Kemudian Douwes Dekker juga mengadakan propaganda di pulau Jawa dan akhirnya bertemu dengan Tjipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat. Tujuan utama dari Indische Partij adalah memajukan tanah air untuk mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka (Kartodirdjo et al. 1975).

Keempat Gerakan Pemuda/Tri Koro Darmo. Awal dari organisasi ini sebenarnya adalah Budi Oetomo. Namun, seiring berjalannya waktu Budi oetomo menjadi sebuah perkumpulan untuk kaum tua. Maka dari itu, golongan muda merasa tidak puas dan mulai sadar bahwasannya mereka harus punya perkumpulan sendiri. Dr. Satiman Wiryosandjono, Kadarman, dan Sunardi bersepakat untuk mendirikan perkumpulan pemuda bernama Tri Koro Darmo pada 7 Maret 1915 di Jakarta dan yang diterima sebagai anggota adalah para anak sekolah menengah yang berasal dari Jawa dan Madura. Tujuan utama dari Tri Koro Darmo adalah mencapai Jawa-Raya dengan jalan memperkokoh rasa persatuan antara pemuda Jawa, Sunda, Madura, Bali, dan Lombok. Tri Koro

Darmo juga memiliki tiga tujuan utama, yakni sakti, budhi, bakti (Kartodirdjo et al. 1975).

Kelima, Perhimpunan Indonesia. Orang-orang Indonesia yang berada di Negeri Belanda seperti R.N. Noto Suroto, Sutan Kasayangan mendirikan sebuah organisasi bernama Perhimpunan Indonesia (PI) pada 1908. Awalnya organisasi ini bernama *Indische Vereeniging*. Tujuan dari organisasi ini adalah memajukan berbagai kepentingan rakyat Indonesia seperti pribumi dan non-pribumi di Negeri Belanda hubungan dengan Indonesia. kesadaran para anggota akan hak dalam menentukan nasib Bangsa Indonesia untuk merdeka mengakar begitu kuatnya semenjak berakhirnya Perang Dunia I. PI selalu aktif dalam gerakan perjuangan kemerdekaan untuk seluruh rakyat Indonesia dengan jiwa persatuan dan kesatuan yang kompak. Bentuk dari gerakannya sempat mengguncangkan pemerintah kolonial kala itu, seperti penerbitan buku-buku peringatan yang berjudul *Gedenboek 1908-1923 Indonesische Vereeniging* dan pada 1914 melakukan perubahan nama majalah *Hindia Poetra* menjadi *Indonesia Merdeka*. Gerakan-gerakan PI yang menimbulkan kekhawatiran dan reaksi keras pemerintah adalah kegiatan PI di kalangan Internasional. Pada suatu saat PI mendapat tuduhan “dengan tulisan menghasut dimuka umum untuk memberontak terhadap pemerintah”. Setelah adanya tuduhan itu, pada 10 Juni 1927, empat anggota PI seperti Nasir Pamontjak, Abdulmajdid Djoyoadingrat, Moh. Hatta, dan Ali Sastroamidjojo ditangkap dan ditahan hingga 8 Maret 1928 (Kartodirdjo et al. 1975).

Keenam, Partai Komunis Indonesia. Munculnya seorang pemimpin buruh Negeri Belanda, yaitu H.J.F.M. Sneevliet yang mula-mula bekerja sebagai anggota staf redaksi pada surat kabar *Soerabajaasch Handelsblad* yang kemudian berhasil mendirikan suatu organisasi bernama Indische Sociaal Democratische Vereeniging (ISDV) bersama orang-orang sosialis seperti J.A. Brandsteder, H.W. Dekker, dan P. Bergsma. ISDV juga bergerak dalam penerbitan majalah *Het Vrije Woord*. Sneevliet dengan teman-temannya merasa bahwasannya ISDV tidak berkembang, karena faktor ISDV yang tidak memiliki pengaruh dan tidak mengakar di dalam masyarakat Indonesia,

sehingga ISDV memilih untuk bersekutu dengan organisasi-organisasi besar yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat. Salah satu organisasi besar yang menjadi target oleh ISDV untuk dijadikan sekutu adalah Sarekat Islam. Kemampuan ISDV dengan berbagai taktiknya akhirnya dapat masuk kedalam tubuh SI dan berhasil mempengaruhi berbagai pemimpin muda SI seperti Semaun dan Darsono. Pada akhirnya, Semaun dan anggota ISV lainnya berhasil menjadikan ISDV merubah namanya menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 23 Mei 1920 dan menetapkan Semaun sebagai pemimpinnya dan Darsono sebagai Wakilnya (Kartodirdjo et al. 1975)

Ketujuh, Partai Nasional Indonesia. Tumbuhnya gagasan nasionalisme modern di Indonesia telah memberikan arah terbentuknya gerakan-gerakan yang bersifat nasional. Masyarakat perlu sebuah wadah untuk menyalurkan berbagai aspirasi dan gagasan mereka yang mungkin bisa diwadahi oleh sebuah organisasi sosial-politik. Untuk itu, Ir. Soekarno mendirikan *Algemeene Studie Club* di Bandung pada 1925. Kemudian pada 4 Juli 1927 atas inisiatif dari *Algemeene Studie Club*, maka diadakan rapat pendirian Perserikatan Nasional Indonesia. rapat tersebut dihadiri oleh Ir. Soekarno dan anggota Perhimpunan Indonesia (PI), yaitu Dr. Tjipto Mangunkusumo, Mr. Budiarto, Mr. Sunarjo, Soedadi, dan Mrs. Iskaq Tjokrohadisurjo. Tujuan utama dari PNI adalah “bekerja untuk kemerdekaan Indonesia”. Tujuan tersebut hendak atau ingin dicapai dengan asas “percaya pada diri sendiri” yang berarti memperbaiki segala keadaan dengan kebiasaan sendiri. Syarat untuk menjadi anggota PNI adalah semua orang Indonesia yang sekurang-kurangnya berumur 18 tahun. PNI juga menjadi sebuah organisasi yang dikecam oleh pemerintah kolonial Belanda kala itu karena berbagai kemajuannya dalam usahanya membawa rakyat untuk bersama-sama memperoleh kemerdekaan, sehingga membuat pemerintah Belanda menjadi khawatir. Namun, pada akhirnya pemerintah kolonial Belanda melakukan tindakan tegas terhadap PNI dengan menangkap pemimpin PNI, yaitu Ir. Soekarno. Hal itu ternyata menjadi sebuah akhir dari perjalanan PNI yang kemudian pada 25 April 1931 keluar surat keputusan untuk

membubarkan organisasi ini (Kartodirdjo et al. 1975).

Kedelapan, adalah Muhammadiyah. Muhammadiyah merupakan organisasi zaman pergerakan nasional yang dipimpin pertama kali oleh K.H. Ahmad Dahlan pada 1912. Fokus utama dalam organisasi ini bukan dalam bidang politik, akan tetapi lebih kepada bidang sosial dan politik (Jayusman and Shavab 2021). Tujuan utama Muhammadiyah adalah memajukan pengajaran dalam pembelajaran Agama Islam di Hindia Belanda (Suwarno 2011). Dalam bidang pendidikan atau pengajaran, Muhammadiyah mempunyai ciri khas tersendiri, yaitu menggabungkan cara-cara tradisional dan modern. Kemudian dalam bidang sosial kemasyarakatan, Muhammadiyah mendirikan infastruktur untuk kebutuhan masyarakat, seperti rumah sakit, panti asuhan, dll (Jayusman and Shavab 2021). Usaha Muhammadiyah pada bidang pendidikan dan sosial membuahkan hasil yang maksimal. Bentuk dari usaha tersebut adalah berupa pendirian sekolah-sekolah, sarana prasarana, dan berbagai lembaga sosial serta rumah sakit.

Kesembilan, organisasi Nahdlatul Ulama (NU). Organisasi ini didirikan di Surabaya pada 31 Januari 1926 oleh K.H. Hasyim Asy'ari. Organisasi ini bergerak dalam kegiatan penyebaran Agama Islam di Indonesia (Djumhur and Danasuparta 1974). Nahdlatul Ulama merupakan suatu “Kebangkitan Ulama” yang terbentuk atas usaha dan koordinasi, serta kesepakatan dengan berbagai kyai. Selain faktor agama sebagai latar belakangnya, menumbuhkan sikap nasionalisme juga merupakan faktor penyebab organisasi ini muncul. Cita-cita untuk memerdekakan diri dari penjajahan terus tumbuh dalam diri masing-masing anggota, sehingga pada saat itu muncul sebuah fatwa yang bernama “Fatwa Jihad” yang dibentuk oleh K.H. Hasyim Asy'ari (Ehwanudin 2016).

Kesepuluh, Putri Mardika. Pada era awal pergerakan nasional Indonesia, perempuan mulai melakukan pergerakan dengan memperjuangkan kedudukan sosialnya. Gerakan Perempuan tersebut tidak hanya dilatarbelakangi oleh sikap serta kebijakan sistem yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial, akan tetapi juga dilatarbelakangi oleh peraturan adat-istiadat waktu itu, seperti perkawinan secara paksa, pembatasan

pendidikan untuk kaum perempuan, dan sebagainya yang bersifat membatasi perempuan untuk berjuang demi haknya (Stuers, Vreede-de, and Rosa 2008). Organisasi perempuan yang pertama kali muncul pada 1912 di Jawa adalah Putri Mardika. Organisasi ini bergerak untuk memperjuangkan kaum wanita dalam hal perjuangan pendidikan, serta berjuang dalam mengangkat harkat dan martabat perempuan (Adam 2007).

Simpulan

Pemerintah kolonial Belanda mengalami perubahan kebijakan, dari kebijakan awal yang diwujudkan dengan kegiatan eksploitasi dan peperangan, kini berubah menjadi kebijakan kesejahteraan bagi rakyat. Kebijakan untuk kesejahteraan rakyat berupa kebijakan politik etis yang diusulkan oleh Van Deventer dan kemudian disahkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Salah satu kebijakan yang dicanangkan dalam bidang edukasi atau pendidikan ialah *Kweekschoolplan* pada 1927, dengan mendirikan beberapa *Kweekschool* (sekolah pendidikan guru) untuk mengatasi permasalahan kurangnya tenaga guru di sekolah-sekolah bumiputra. Dalam praktiknya, *Kweekschool* ini memiliki beberapa program pendidikan untuk jenis-jenis guru. Kebijakan politik etis ini juga tentunya memiliki pengaruh terhadap transformasi sosial masyarakat Hindia Belanda. Guru-guru lulusan *Kweekschool* memiliki peran dan pengaruh terhadap kualitas pendidikan murid-murid sekolah-sekolah bumiputra, dan memberikan mereka kesadaran akan perlunya melakukan perjuangan kemerdekaan bagi Bangsa Indonesia. Lahirnya kaum terpelajar memberikan pengaruh besar yang tidak diduga oleh pemerintah kolonial Belanda. Kaum terpelajar itulah yang nantinya akan melakukan gerakan emansipasi yang diawali dengan pembentukan organisasi pergerakan nasional.

Referensi

Abdullah, Aznar. 2017. "Ethical Politic and Emergence of Intellectual Class." *Paramita: Historical Studies Journal* 27(1):37-49.

Adam, Asvi Warman. 2007. *Seabad Kontroversi*

Sejarah. Yogyakarta: Ombak.

- Alfarez, Sidqi. 2022. "Pengajaran Dan Perjuangan: Peran Tokoh-Tokoh Pribumi Lulusan Kweekschool Sebagai Pembangkit Nasionalisme Indonesia Abad 19." *Siginjai: Jurnal Sejarah* 2(1):28-44. doi: <https://doi.org/10.22437/js.v2i1.17656>.
- Azra, Azyumardi. 2000. *Pendidikan Islam, Tradisi Dan Modernisasi Menuju Millenium Baru*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Birsyada, Muhammad Iqbal, and Siswanta Siswanta. 2021. "Inovasi Pendidikan Karakter Bangsa Berbasis Nilai-Nilai Sejarah Perjuangan Pangeran Sambernyowo Di Era Masyarakat 5. 0." *Diakronika* 21(1):45-56. doi: 10.24036/diakronika/vol21-iss1/179.
- Birsyada, Muhammad Iqbal, Wasino Wasino, Suyahmo Suyahmo, and Hermanu Joebagio. 2016. "Bisnis Keluarga Mangkunegaran." *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 24(1):111. doi: 10.21580/ws.24.1.975.
- Daliman, A. 2012. *Sejarah Indonesia Abad XIX-Awal Abad XX*. Yogyakarta: Ombak.
- Djumhur, I., and H. Danasuparta. 1974. *Sejarah Pendidikan*. Bandung: Penerbit CV ILMU Bandung.
- Ehwanudin. 2016. "Tokoh Proklamator Nahdlatul Ulama (Studi Historis Berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama)." *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 1(2):447-68.
- Ekajati, Edi S., and Sutrisno Kutoyo. 1986. *Sejarah Pendidikan Daerah Jawa Barat*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah.
- Fachrurozi, Miftahul Habib. 2019. "Politik Etis Dan Bangkitnya Kesadaran Baru Pers Bumiputra." *Bihari: Pendidikan Sejarah Dan Ilmu Sejarah* 2(1):13-25.
- Fahrozy, Fazrul Prasetya Nur, Sofyan Iskandar, Yunus Abidin, and Mia Zultrianti Sari. 2022. "Upaya Pembelajaran Abad 19-20 Dan Pembelajaran Abad 21 di Indonesia." *Jurnal Basicedu* 6(2):3094-3101. doi: <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i2.2098> ISSN.
- Fakhriansyah, Muhammad, and Intan Ranti Permatasari Patoni. 2019. "Akses Pendidikan

- Bagi Pribumi Pada Periode Etis (1901-1930).” *Jurnal Pendidikan Sejarah* 8(2):122–47. doi: <https://doi.org/10.21009/JPS.082.03>.
- Galih, Dhimas Rangga, and Artono. 2017. “Penerapan Politik Etis Di Surabaya Tahun 1911-1930.” *AVATARA: E-Journal Pendidikan Sejarah* 5(3):751–65.
- Imsawati, Dwi Nur. 2017. “The Intellectual’s Contribution In The National Movement Of In Indonesian 1908-1928.” *Jurnal Historica* 1(2):277–92.
- Jayusman, Iyus, and Oka Agus Kurniawan Shavab. 2021. “Peranan Sarekat Islam (SI) Dan Muhammadiyah Sebagai Gerakan Politik Dan Pendidikan Pada Masa Pergerakan Nasional.” *Candrasangkala: Jurnal Pendidikan Dan Sejarah* 7(2):82–92. doi: <http://dx.doi.org/10.30870/candrasangkala.v7i2.3669>.
- Karsiwan, and Lisa Retno Sari. 2021. “Kebijakan Pendidikan Pemerintah Kolonial Belanda Pada Masa Politik Etis Di Lampung.” *Tsaqofah Dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan Dan Sejarah Islam* 6(1):1–16. doi: <http://dx.doi.org/10.29300/ttjksi.v6i1.4375>.
- Kartodirdjo, Sartono, Marwati Djoened Poesponegoro, and Nugroho Notosusanto. 1975. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid V*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kuntowijoyo. 2013. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kurniawati, Yeni, and Ayi Budi Santosa. 2023. “Ragam Pendidikan Guru Masa Pemerintahan Kolonial.” *FACTUM: Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah* 12(2):257–76. doi: <https://doi.org/10.17509/factum.v12i2.64131>.
- Kusmayadi, Yadi. 2017. “Sejarah Perkembangan Pendidikan Di Priangan 1900-1942.” *Jurnal Artefak* 4(2):141–52. doi: [10.25157/ja.v4i2.908](https://doi.org/10.25157/ja.v4i2.908).
- Leirissa, and Richard Zakarias. 1985. *Sejarah Masyarakat Indonesia 1900-1950*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Lubis, Nina Herlina, Toni Djubiantono, Dadan Wildan, Ety Saringendyanti, Reiza D. Dienaputra, Kunto Sofianto, Awaludin Nugraha, and Miftahul Falah. 2013. *Sejarah Provinsi Jawa Barat Jilid 2*. Bandung: Universitas Padjadjaran, Yayasan Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Jawa Barat.
- Mulyono, S. 1968. *Nasionalisme Sebagai Modal Perjuangan Bangsa Indonesia I*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Nasution. 1983. *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Bandung: Bumi Aksara.
- Niel, Robert Van. 2009. *Munculnya Elite Modern Indonesia*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Palahuddin. 2018. “Modernisasi Pendidikan Islam Di Indonesia Awal Abad Ke-XX: Kasus Muhammadiyah.” *SANGKÉP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan* 1(1):61–84. doi: [10.20414/sangkep.v1i1.606](https://doi.org/10.20414/sangkep.v1i1.606).
- Pols, Hans. 2019. *Merawat Bangsa: Sejarah Pergerakan Para Dokter Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Purwati, Diah. 2015. “Peranan Kweekschool Dalam Munculnya Guru Bumiputera Di Hindia Belanda (1852-1942).” Skripsi, Universitas Negeri Malang.
- Ricklefs, Merle Calvin. 2001. *A History Modern of Indonesia Since. c. 1200*. 3 th. Houndmills, Basingstoke, Hampshire RG21 6XS Companies and Representatives Throughout the World: Palgrave.
- Ricklefs, Merle Calvin, and Moh. Sidik Nugraha. 2008. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Riska, and Hudaidah. 2021. “Sistem Pendidikan Di Indonesia Pada Masa Portugis Dan Belanda.” *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 3(3):824–29. doi: <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i3.470>
- Seviana, Tessa. 2019. “Pendidikan Calon Guru (Hoogere Kweekschool) Di Magelang Tahun 1918-1932.” Skripsi, Universitas Sebelas Maret.
- Simbolon, Parakriti T. 2006. *Menjadi Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Slamet Muljana. 2008. *Kesadaran Nasional Dari Kolonialisme Sampai Kemerdekaan*. Yogyakarta: LKiS.
- Soniadewi, Nazhiifah Nuur’ainii, and Dian Satria Charismana. 2016. “Perkembangan Sekolah

- Guru: Hoogere Kweekschool Purworejo Tahun 1914-1930." *HISTORIA MADANIA: Jurnal Ilmu Sejarah* 8(2):193–206. doi: <https://doi.org/10.15575/hm.v8i2.41515>.
- Steenbrink, and Karel A. 1984. *Beberapa Aspek Tentang Islam Di Indonesia Abad 19*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Stuers, Cora Vreede-de, and Elvira Rosa. 2008. *Sejarah Perempuan Indonesia: Gerakan Dan Pencapaian*. Depok: Komunitas Bambu.
- Sudiyo. 2002. *Pergerakan Nasional Mencapai & Mempertahankan Kemerdekaan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sumanto, Wasty, and Soeyarno F.X. 1983. *Landasan Historis Pendidikan Indonesia*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Sumarno, R. N. Bayu Aji, and Eko Satriya Hermawan. 2019. "Ethical Politics and Educated Elites In Indonesian National Movement." *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* 383(Icss):369–73. doi: 10.2991/icss-19.2019.170.
- Susilo, Agus, and Isbandiyah Isbandiyah. 2018. "Politik Etis Dan Pengaruhnya Bagi Lahirnya Pergerakan Bangsa Indonesia." *HISTORIA Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah* 6(2):403–16. doi: 10.24127/hj.v6i2.1531.
- Suwarno. 2011. *Latar Belakang Dan Fase Awal Pertumbuhan Kesadaran Nasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suwignyo, A. 2012. "The Breach in The Dike : Regime Change and The Standardization of Public Primary-School Teacher Training in Indonesia, 1893-1969." Disertasi, Leiden University.
- Syarif, M. 2019. "Politik Etis Pemerintah Kolonial Hindia Belanda Dan Pengaruhnya Terhadap Pesantren." *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan* 5(1):109–31.
- Utari, Shela Dwi. 2020. "Mooi Indie Dalam Lingkar Seni Lukis Modern Indonesia (1900-1942)." *Jurnal Dimensi Sejarah* 1(1):157–74. doi: 10.17977/um020v1i12020p157.
- Utomo, C. B. 1995. *Dinamika Pergerakan Kebangsaan Indonesia: Dari Kebangkitan Hingga Kemerdekaan*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Wasino. 2007. *Dari Riset Hingga Tulisan Sejarah*. Semarang: Panitia Pengadaan Buku Ajar Guggus Pengembangan Mutu Akademik Pusat Penjamin Mutu Universitas Negeri Semarang Dan Penerbit Unnes Press.
- Yasmis. 2009. "Sarikat Islam Dalam Pergerakan Nasional Indonesia (1912-1927)." *Jurnal Sejarah LONTAR* 6(1):21–32. doi: <https://doi.org/10.21009/LONTAR.061.03>.
- Yudi, Latif. 2012. *Negara Paripurna*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Zed, Mestika. 2012. "Engku Mohammad Sjafe' i Dan INS Kayutanam : Jejak Pemikiran Pendidikannya." *TINGKAP: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Sosial Budaya & Ekonomi* 8(2):173–88.